

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan telah menjadi isu internasional yang dikategorikan sebagai keamanan non tradisional. Permasalahan ini dapat mengganggu stabilitas negara karena memberikan ancaman kepada pemerintah dan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi fokus dunia adalah limbah. Limbah secara luas dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama yaitu limbah cair, padat, dan gas. Limbah juga bisa dibedakan berdasarkan sumbernya seperti limbah rumah/kota, komersial/industri, tambang dan lain lain.¹ Adapun dampak pengelolaan limbah yang tidak efektif mengakibatkan kesehatan manusia terganggu, meningkatnya polusi udara, tanah yang beracun, air yang terkontaminasi, serta hilangnya bahan dan sumber daya yang berharga.²

Tidak hanya membahayakan manusia dan alam, secara ekonomi limbah juga dapat merugikan suatu negara. Sejak tahun 1988 hingga 2020, terdapat 252.448.534 ton limbah plastik yang telah diekspor di seluruh dunia. Setiap tahunnya ribuan kontainer pengiriman yang diisi dengan limbah daur ulang diekspor oleh negara-negara kaya ke negara-negara berkembang. Hal ini karena pengeluaran negara lebih murah untuk mengekspor limbah daripada mengembangkan infrastruktur daur ulang lokal.³ Sehingga ekspor limbah mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, peningkatan ekspor limbah tidak sejalan dengan mekanisme pengolahannya. Limbah yang seharusnya dikelola melalui tempat pembuangan akhir (TPA), namun hanya dibakar atau

¹ Ebikapade Amasuomo and Jim Baird, "The Concept of Waste and Waste Management," *Journal of Management and Sustainability* 6, no. 4 (2016): 88.

² Sustainable Development, *Chemicals Mining Transport Trends in Sustainable Development Waste*, 2010.

³ Ian Tiseo, "Waste Trade Worldwide - Statistics & Facts," *Statista*, last modified 2022, accessed September 21, 2022, <https://www.statista.com/topics/7943/global-waste-trade/#dossierKeyfigures>.

dibuang secara ilegal yang menimbulkan kerusakan pada ekosistem alam.⁴ Hal ini disebabkan oleh infrastruktur negara yang kurang memadai dan tujuan untuk pengeluaran negara yang minim.⁵

Australia adalah salah satu negara yang telah lama menjalankan pengelolaan limbah dengan cara mengekspornya ke negara lain. Limbah yang mereka produksi mencapai angka 76 juta ton per tahun yang dimana angka ini mengalami kenaikan 57 persen dari 15 tahun lalu dan dengan persentase tertinggi untuk mendaur ulang yaitu 50 persen dari total angka tersebut dan 27 persen berakhir pada tempat pembuangan akhir (TPA).⁶ Kurangnya pengelolaan limbah tersebut mengakibatkan Australia harus mengekspor limbahnya. Sejak 1990 Australia telah memiliki neraca perdagangan yang positif untuk limbah. Neraca perdagangan ini telah tumbuh secara signifikan dari \$469 juta pada 2001-2002 menjadi \$2,268 juta pada 2011-2012.⁷ Maka dari itu, Australia berusaha untuk mengatur pengelolaan limbahnya melalui ekspor.

Tiongkok yang telah menjadi “bank sampah dunia” sejak tahun 1998 hingga 2016 telah menjadi target ekspor limbah dari berbagai negara termasuk Australia. Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat ketergantungan negara untuk mengekspor limbah negaranya kepada Tiongkok dapat dilihat dari kepekatan gradasi warna garis kuning-oranye yang terdapat di gambar. Target ekspor limbah Australia selama ini adalah Tiongkok dikarenakan keterbukaan Tiongkok dalam menerima limbah untuk mereka kelola. Permintaan Tiongkok terhadap sumber daya mentah dan daur ulang telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa dekade terakhir yang kemudian menjadi mitra ekspor impor limbah yang baik bagi Australia.⁸

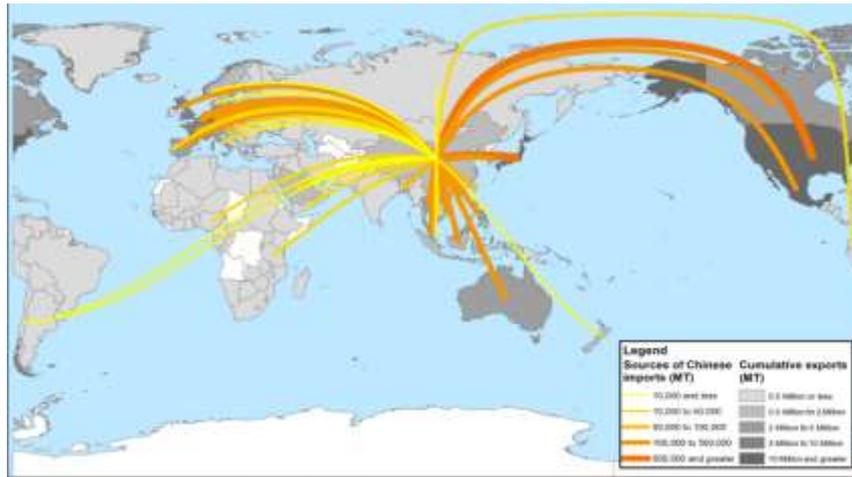
⁴ Diana Barrowclough, Carolyn Deere Birkbeck, and Julien Christen, “Insights from the First Life-Cycle Trade Database,” *UNCTAD Research Paper*, no. 53 (2020): 1–68.

⁵ Ian Tiseo, “Waste Trade Worldwide - Statistics & Facts,” *Statista*, last modified 2022, diakses pada 21 September 2022, <https://www.statista.com/topics/7943/global-waste-trade/#dossierKeyfigures>.

⁶ Australian Bureau of Statistic, “Waste Account Australia Experimental Estimates,” last modified 2020, accessed February 27, 2024, <https://www.abs.gov.au/statistics/environment/environmental-management/waste-account-australia-experimental-estimates/latest-release#cite-window1>.

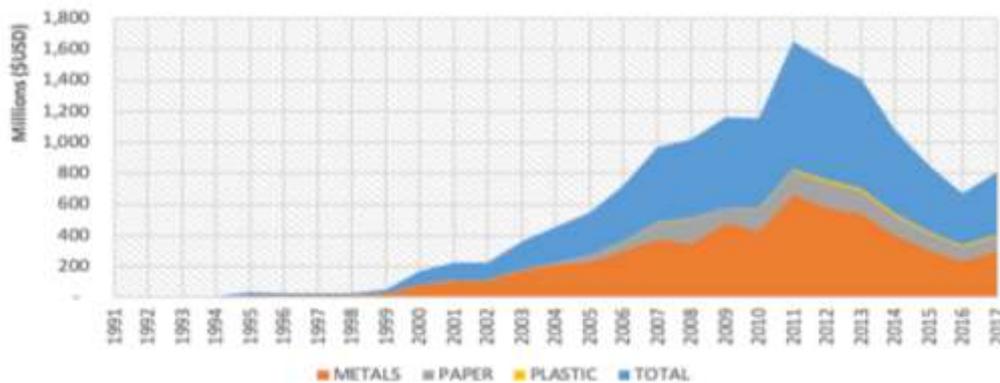
⁷ “Waste and Recycle,” *Australian Government, Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water*, diakses pada 25 Maret, 2022, <https://www.dcceew.gov.au/environment/protection/waste>.

⁸ Sally Donovan and Joe Pickin, *Exports of Australian Waste and Recovered Materials in 2020-21*, 2021.



Gambar 1.1. Sumber Impor Limbah Plastik ke Tiongkok Pada Tahun 2016 dan Tonase Ekspor Limbah Plastik Kumulatif (dalam juta MT) pada Tahun 1988–2016.

Sumber : United Nations Comtrade Database



Gambar 1.2. Total Ekspor Limbah dari Australia ke Tiongkok Berdasarkan Nilai Finansial, 1991 – 2017

Sumber : United Nations Comtrade Database

Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan total ekspor limbah dari Australia ke Tiongkok dari tahun 1991 yang menunjukkan angka di bawah \$200 juta USD menjadi \$800 juta USD secara total pada tahun 2017. Pada tahun 2011 merupakan puncak tertinggi dari total ekspor limbah Australia ke Tiongkok yaitu \$1600 juta.⁹ Adanya ekspor limbah ke Tiongkok tersebut memberikan kemudahan Australia dalam pengelolaan limbah negara yang kurang maksimal. Australia juga mengekspor limbahnya ke negara lain selain Tiongkok, seluruh ekspor limbah berdasarkan negara tujuan, dan memberi peringkat pada enam negara tujuan yang menerima bahan baku terbanyak yaitu Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia.

⁹ “UN Comtrade Database of Total Waste Exports from Australia to China by Financial Value,” *UN Comtrade*, last modified 2019, accessed March 25, 2022, <https://comtrade.un.org/data/>.

Ekspor limbah Australia ke Tiongkok dari tahun 2014 – 2018 mengalami penurunan yang dimana dimulai dari 120.000 hingga 140.000 Ton menjadi hanya 20.000 ton, sedangkan ekspor limbah Australia ke negara lain dengan tahun yang sama mengalami peningkatan yang dimana pada 2014 dimulai dari 50.000 ton melesat hingga 100.000 ton.¹⁰ Tiongkok adalah negara tujuan dengan peringkat teratas pada setiap tahunnya hingga 2018, namun hal angka tersebut menurun karena pemberlakuan larangan ekspor limbah ke Tiongkok.¹¹

Tiongkok yang telah lama menjadi tempat akhir pembuangan limbah dari banyak negara di dunia, pada bulan April 2011 mengeluarkan peraturan *Article 12* yang bertujuan untuk mengurangi kontaminasi pada bahan impor. Dilanjutkan lagi pada Februari 2013, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk secara agresif menegakkan *Article 12* untuk meningkatkan kualitas barang daur ulang yang diimpor melalui '*Operation Green fence*'. Kelanjutan dari *Operation Green Fence* (OGF) ditandai dengan adanya kebijakan yang diperbarui atas nama *National Sword Policy* pada bulan Februari 2017. Pada 18 Juli 2017, Tiongkok mengumumkan larangan 24 bahan impor ke World Trade Organisation (WTO), dan mengumumkan niatnya untuk menghapus impor limbah padat (daur ulang) yang dapat diganti dengan sumber daya domestik. Pada 11 Januari 2018, Tiongkok mengkonfirmasi standar kontaminasi dan larangan tersebut telah berlaku memaksa. Ambang batas kontaminasi utama meliputi: 0,5persen untuk plastik; kertas bekas atau kertas karton; terak berbau; kayu; limbah motor listrik; kabel dan kabel; skrap logam dan peralatan; logam besi. 1persen untuk logam non besi. 0,3persen untuk skrap mobil.¹²

Penarikan tak terduga Tiongkok dari perdagangan daur ulang telah mengakibatkan jatuhnya permintaan secara keseluruhan.¹³ Dalam merespons hal tersebut *The Waste*

¹⁰ Joe Pickin and Jenny Trinh, "Data on Exports of Australian Wastes 2018-19," *Data on exports of Australian Wastes* 2019, no. November 2019 (version 2) (2019): 1–10.

¹¹ Australian Bureau of Statistic, "Waste Account Australia Experimental Estimates."

¹² Mike Ritchie, "China National Sword: The Role of Federal Government," *Australia: MRA*, no. April (2018): 1–18.

¹³ Ritchie, "China National Sword: The Role of Federal Government."

Management Association of Australia (WMAA), memperkirakan bahwa *National Sword Policy* oleh Tiongkok mempengaruhi rata-rata tahunan 619.000 ton bahan yang dihasilkan di Australia, senilai \$523 juta.¹⁴ Pada November 2019, Australia juga mengeluarkan *National Waste Policy Action Plan* (NWPAP) yang menargetkan menyentuh angka 80persen dalam meningkatkan pemulihan sumber daya Australia dan beberapa indikator lain.¹⁵ Kebijakan *National Waste Policy Action Plan* menunjukkan hasil yang positif yaitu 6 dari 7 indikatornya telah mengalami kemajuan dan telah dilaksanakan.¹⁶ Diantaranya indikator ke empat yaitu dengan target meningkatkan penggunaan konten daur ulang oleh pemerintah dan industri mengalami kenaikan 10 persen dari tahun 2017. *The Council of Australian Governments* (COAG) memberikan respon yang positif dan sejalan dengan kebijakan ini.¹⁷

1.2 Rumusan Masalah

Australia merupakan negara yang banyak mengekspor limbah dalam negerinya sebagai solusi sementara untuk pengelolaan limbahnya sejak lama, bahkan menjadi salah satu pengekspor limbah tertinggi di dunia. Tiongkok yang selama ini menjadi ‘bank sampah dunia’ telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dari tahun 2013 dan diperkuat pada tahun 2018 atas nama *National Sword Policy* yang memberikan dampak pada arus impor limbah ke Tiongkok. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang besar kepada Australia yang selama ini menjadi mitra ekspor limbah ke Tiongkok. Tahun demi tahun adanya peningkatan ekspor limbah Australia kepada Tiongkok memberikan dampak kejut terhadap Australia sehingga kebijakan Tiongkok yang melarang pengeksporan limbah kepada Tiongkok menjadi pemicu bagi

¹⁴ “China’s Ban on Foreign Waste Leaves Australian Recycling Industry Eyeing Opportunities,” *ABC News*, last modified 2017, diakses pada 21 November 2021, <http://www.abc.net.au/news/2017-12-10/china-ban-on-foreign-rubbish-leaves-recycling-industry-in-a-mess/9243184>.

¹⁵ Mike Ritchie, *China’s National Sword Policy: The Impact on Australia’s Recycling* (Canada Bay, 2018).

¹⁶ Joe Pickin et al., *National Waste Report 2020*, *Blue Environment Pty Ltd*, 2020, <https://www.environment.gov.au/system/files/resources/7381c1de-31d0-429b-912c-91a6dbc83af7/files/national-waste-report-2018.pdf>.

¹⁷ Ritchie, “China National Sword: The Role of Federal Government.”

Australia untuk mengelola limbah yang lebih komprehensif dan tidak bergantung pada ekspor limbah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis kemudian menarik pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Australia merespon larangan ekspor limbah ke Tiongkok?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Australia merespon kebijakan larangan impor limbah yang diberlakukan oleh Tiongkok.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini akan menambah kepustakaan dalam kajian ilmu hubungan internasional, khususnya yang berkaitan respon dan mitigasi limbah oleh Australia terhadap larangan ekspor limbah kepada Tiongkok.
2. Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi rujukan terkait hubungan bilateral antara Australia dan Tiongkok. Serta mendeskripsikan pilihan rasional Australia dalam merespon kebijakan larangan ekspor limbah kepada Tiongkok.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisis penelitian ini peneliti berupaya untuk merangkum informasi sebanyak mungkin yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti telah mengumpulkan berbagai karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai pemandu bagi peneliti dalam menulis penelitian ini, adapun beberapa karya tulis yang peneliti jadikan rujukan antara lain sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “Reconceptualising Waste: Australia’s National Waste Policies” oleh Antonia Flowers.¹⁸ Artikel ini membahas konseptualisasi dari *National Waste Plan* Australia dari 1992 hingga 2018 dalam merespon turbulensi limbah dunia sebelum dan setelah perubahan kebijakan ekspor impor limbah Tiongkok. *The 2018 National Waste Policy: Less Waste, More Resource* dibuat sebagai respon larangan impor limbah Tiongkok yang dikenal sebagai *National Sword Policy*. Untuk mengatasi hal ini Australia menerapkan *Circular Economy* dalam kebijakan *National Waste Policy* 2018. *Circular Economy* adalah model produksi dan konsumsi, yang melibatkan berbagi, menyewakan, menggunakan kembali, memperbaiki, memperbarui, dan mendaur ulang bahan dan produk yang ada selama mungkin. Hal ini menyiratkan pengurangan limbah seminimal mungkin. Keterbatasan dari strategi ini adalah kebanyakan material tidak bisa di daur ulang terus menerus. Namun strategi ini ada implikasi untuk terjadinya *Relative Decoupling* yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan penggunaan energi. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada alur penelitian yang membahas kebijakan limbah Australia, artikel ini membahas perkembangan kebijakan dan strategi limbah Australia dari 1992 hingga 2018 serta menawarkan konseptualisasi alternatif limbah sebagai tindakan produksi yang bertentangan dengan tindakan pembuangan, dengan demikian mencoba membongkar pemisahan ontologis antara limbah dan produk. Penulis menarik kesimpulan bahwa artikel ini berguna untuk penulis dalam meneliti karena uraian dan konseptualisasi dari kebijakan Australia tahun ke tahun akan membantu penelitian ini yang terfokuskan hanya kepada respon Australia terkait *National Waste Policies* 2017 dan pembeda dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus penelitian yang dimana penelitian oleh Antonia memfokuskan pada kebijakan *National Waste Policy Action Plan* dengan ekonomi sirkularnya.

¹⁸ Antonia Flowers, “Reconceptualising Waste: Australia’s National Waste Policies,” *Journal of Australian Political Economy* 2021, no. 87 (2021): 95–120.

Sumber rujukan kedua yaitu artikel jurnal yang berjudul “The Political Economy of Australia’s Waste Crisis: From Neoliberalism to the Circular Economy Agenda” oleh Wynston Joon Yuen Lee.¹⁹ Artikel ini membahas krisis limbah di Australia karena perubahan kebijakan Tiongkok melalui *National Sword Policy*. Artikel ini membandingkan perspektif ekonomi ortodoks, ekonomi sirkular dan ekonomi politik tentang strategi Australia dalam menanggulangi krisis limbah. Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat dua fase Australia dalam menjalani krisis limbah ini yaitu: (1) fase ekspansi dalam industri limbah Australia dari tahun 1992 dan seterusnya, didorong oleh berorientasi ekspor pertumbuhan dan kebijakan neoliberal yang pada akhirnya berujung pada krisis limbah di tahun 2018, dan (2) munculnya tahap pemulihan industri yang dimulai dengan kebijakan ekonomi sirkular dan pembangunan yang lebih berorientasi domestik. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian terletak pada fokus dan pendekatannya, artikel ini menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengkaji kebijakan Australia dan fokus kepada pemulihan ekonomi yang dijalankan melalui ekonomi sirkular yang pragmatis untuk merangsang pemulihan ekonomi daripada perubahan radikal menuju kelestarian lingkungan. Sedangkan penelitian yang penulis akan teliti memfokuskan pada rasionalisasi respon Australia terhadap kebijakan Tiongkok. Manfaat penelitian ini bagi penelitian yang akan penulis teliti yaitu memberikan pandangan terkait cakupan Australia dari masa ke masa khususnya pada sektor ekonominya sehingga dapat memperluas pandangan peneliti terkait topik yang akan diteliti.

Sumber rujukan ketiga adalah artikel jurnal yang berjudul “Pengaruh Kebijakan National Sword Cina Terhadap Ekspor Limbah Padat Inggris Tahun 2018-2019” oleh Amalia Rantika.²⁰ Artikel ini menjelaskan Inggris harus menyesuaikan peraturan lingkungannya sejak National Sword Policy di Tiongkok diberlakukan. Langkah yang Inggris lakukan adalah

¹⁹ Wynston Joon Yuen Lee, “The Political Economy of Australia’s Waste Crisis: From Neoliberalism to the Circular Economy Agenda,” *Circular Economy and Sustainability* (2021).

²⁰ Amalia Rantika, “Pengaruh Kebijakan National Sword Cina Terhadap Ekspor Limbah Padat Inggris Tahun 2018-2019,” *Jom Fisip* 7, no. 1 (2020): 1–11.

melarang barang plastik sekali pakai mulai tahun 2020. Kedua, Inggris berusaha mencari tempat untuk membuang limbahnya selain dari Cina. Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia menjadi alternatif ekspor limbah Inggris setelah Cina. Respon Inggris untuk menanggulangi isu ini menjadi pembanding yang baik bagi penelitian penulis, strategi Inggris yang mencari TPA baru dan berusaha mendorong sektor industri pengolahan limbah namun belum ada kejelasan bagaimana, sedangkan Australia yang mengambil strategi untuk pemulihan ekonomi dengan circular ekonomi sebagai respon *National Sword Policy* Tiongkok. Artikel ini membantu peneliti untuk memberikan pandangan terhadap analisis terkait kasus yang berbeda di negara yang berbeda, serta memberikan pandangan bagaimana menangani kasusnya dengan pendekatan yang berbeda yang diambil oleh Inggris. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terletak pada subjek negaranya yang dimana penelitian ini fokus kepada Inggris.

Sumber rujukan keempat adalah artikel jurnal yang berjudul “Analisis Ekspor dan Impor Sampah Padat antara Cina dan Amerika Serikat: Operation Green Fence (2013) dan Operation National Sword (2018)” oleh Meilisa Setyani.²¹ Penelitian ini membahas penyebab Cina memberlakukan kebijakan *Operation Green Fence* (OGF) dan *Operation National Sword* (ONS) dan dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan adalah faktor utama adapun faktor lain seperti kesehatan, serta adanya tekanan dari dalam maupun dari luar negeri. Dampak yang dihasilkan dari kedua kebijakan ini mempengaruhi perekonomian yang tidak hanya di antara Cina ataupun Amerika Serikat, tetapi juga internasional. Jumlah permintaan dan penawaran atas limbah padat di seluruh dunia, khususnya di Cina dan Amerika Serikat terpengaruh, mengingat kebijakan yang diberlakukan adalah kebijakan untuk membatasi impor limbah padat yang dilakukan oleh Cina. Perbedaan

²¹ Meilisa Setyani, “Analysis of Solid Waste Export and Import Between China And,” *Verity Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 11, no. 22 (2019): 51–69.

artikel ini dengan penelitian terletak pada studi kasus serta artikel ini membahas faktor terbentuknya kebijakan larangan impor limbah Tiongkok dan artikel ini memberikan pandangan terhadap bagaimana Amerika Serikat menanggulangnya. Artikel ini membantu penulis melalui melihat bagaimana negara lain merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok dan menjadi data pembandingan.

Sumber rujukan kelima adalah artikel jurnal yang berjudul “Australia and China: Framing an Ambivalent Relationship” oleh Michael J. Davis.²² Artikel ini membahas tentang mengapa, kendati hubungan Australia dan Tiongkok sejak pembukaan hubungan diplomatik menjadi cukup dekat, dikondisikan atau “dibingkai” sebagai sebuah hubungan yang ambivalen. Hubungan kedekatan yang ambivalen ini sejatinya mulai terbentuk sejak Tiongkok diakui kedaulatannya oleh Australia pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Whitlam pada 1972 berikut keputusan pendekatan Tiongkok secara spesifik pada ekonomi pada masa Pemerintahan Bob Hawke pada 1980-an. Dari sini, Davis berkesimpulan bahwa kendati hubungan keduanya dekat, tetapi tidak akan mengakar karena Australia sendiri dilemma akan kedua hal yang menjadi faktor penentu dinamika hubungannya dengan Tiongkok: pembukaan ekonomi yang lebih terbuka merujuk pada prinsip neoliberalisme dengan pertentangan ideologis yang masih eksis di antara keduanya. Penelitian ini memberikan pandangan bagaimana Perdana Menteri Australia pada masa lampau menyikapi turbulensi hubungan bilateral dengan Tiongkok dan memberikan data terkait hubungan ekonomi, diplomatik, serta perdagangan sampah dari masa tersebut. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penelitian ini memfokuskan bagaimana hubungan bilateral antara Tiongkok dengan Australia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri tertentu yang tentunya akan berpengaruh di masa tersebut dan kedepannya.

²² Michael . Davis, “Australia and China: Framing an Ambivalent Relationship,” *Asian Studies Review* (2020).

1.7 Kerangka Konseptual

Penggunaan teori maupun konsep dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan sebagai alat yang digunakan untuk membantu penulis menganalisis permasalahan yang ada serta membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dipaparkan.

1.7.1 Rational Choice Theory

Asumsi umum pada *rational choice theory* yaitu pertama aktor harus ada tujuan dan berorientasi pada tujuan, kedua aktor memiliki himpunan yang tersusun secara hierarki preferensi dan ketiga dalam memilih perilaku, aktor bersikap rasional dalam menentukan keputusan dengan menggunakan opsi perilaku yang mengacu pada urutan hierarki preferensi, biaya alternatif dan potensi terbaik untuk memaksimalkan utilitas.²³ Ide dasar dari *rational choice theory* adalah suatu perilaku sosial kumulatif dihasilkan oleh perilaku para pelaku individu dalam membuat keputusan. Dalam menentukan pengambilan keputusan aktor akan menentukan kepentingan nasional yang digambarkan sebagai rasional dimana rasionalitas di sini merupakan perilaku yang bertujuan dan diarahkan kepada tujuan untuk menggunakan informasi terbaik yang tersedia dan memilih kemungkinan yang paling memungkinkan untuk memaksimalkan tujuannya.²⁴ Menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton dalam membuat suatu kebijakan aktor akan menggambarkan perilaku sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan terbaik dengan memprediksi konsekuensi dalam memperkirakan hasil dari keputusan yang diambil. Terdapat empat inti dari *rational choice theory* menurut Kegley dan Blanton yakni sebagai berikut.²⁵

1. *Problem Recognition and Definition* (Identifikasi dan Definisi Permasalahan)

Mengidentifikasi masalah merupakan kebutuhan dan keharusan dalam memutuskan pada saat pembuatan kebijakan dalam melihat permasalahan eksternal dan mencoba untuk

²³ Maude Beaudry-Cyr, "Rational Choice Theory," *The Encyclopedia of Crime and Punishment* 1 (2016): 1–3.

²⁴ Charles W. Kegley and Shannon L. Blanton, *World Politics: Trend & Transformation*, World Politics, 16th ed. (Wadsworth Publishing, 2016).

²⁵ Kegley and Blanton, *World Politics: Trend & Transformation*.

mendefinisikan secara spesifik. Hal ini membutuhkan informasi yang banyak mengenai tindakan, motivasi dan kapabilitas aktor lain dan lingkungan global serta tren. Dikarenakan hal itu dibutuhkan pencarian informasi yang menyeluruh dan fakta yang dikumpulkan harus relevan dengan masalah.

2. *Goal Selection* (Penentuan Tujuan)

Aktor yang bertanggungjawab dalam membuat pilihan kebijakan harus menentukan apa yang ini dicapai. Hal ini sering kali menjadi kesulitan bagi aktor sehingga membutuhkan identifikasi dan mengurutkan nilai keamanan, ekonomi, serta sosial dari yang paling baik hingga terburuk.

3. *Identification of Alternative* (Identifikasi Alternatif)

Dalam rasionalitas membutuhkan pengumpulan data lengkap dari semua kebijakan yang tersedia dan perkiraan biaya alternatif. Dalam upaya mencapai tujuan diperlukan tindakan yang diambil atau menentukan solusi dalam sebuah kebijakan. Alternatif kebijakan ini dapat mengubah permasalahan yang dihadapi di masa depan menjadi lebih baik.

4. *Choice* (Pilihan)

Rasionalitas membutuhkan pemilihan satu alternatif yang memiliki peluang yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga aktor harus melakukan analisis sarana, biaya dan manfaat dari kemungkinan keberhasilan. Selain itu menganalisis keuntungan dan kerugian sangat diperlukan sehingga memiliki peluang keuntungan pada setiap alternatif.

Berdasarkan penjelasan kerangka konsep di atas, peneliti menggunakan *rational choice theory* dikarenakan kesesuaian untuk menganalisis kebijakan Australia terhadap larangan ekspor limbah kepada Tiongkok dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia merupakan pilihan rasional yang diambil terhadap larangan dari Tiongkok. Penulis akan mendeskripsikan pilihan rasional dari kebijakan Australia dalam menjawab larangan ekspor

limbah kepada Tiongkok dengan menggunakan empat inti dari *rational choice theory* menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam ilmu hubungan internasional didefinisikan sebagai suatu proses, prinsip ataupun prosedur yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh pengetahuan mengenai suatu fenomena tertentu dalam konteks hubungan internasional.²⁶

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengharuskan penulis untuk memberikan pemahaman dan penafsiran terhadap suatu fenomena dengan cara mengolah bahan-bahan yang empiris seperti pengalaman pribadi, introspeksi, studi kasus, observasi, interview, cerita hidup, sejarah, teks tertulis, hingga interaksi.²⁷

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis karena berkaitan dengan sebuah cara dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, ataupun kondisi dengan tujuan untuk menggambarkan keterkaitan subjek dengan fenomena yang terjadi.²⁸ Dalam topik ini, metode penelitian yang dilakukan diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana Australia merespon larangan ekspor limbah kepada Tiongkok.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup dari penelitian dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian yang akan mengarah ke hal – hal spesifik yang akan dijadikan kesimpulan. Penelitian ini akan dibatasi ruang waktu penelitian pada tahun 2017 –

²⁶ Mas'oed, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta. (2009).

²⁸ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, "Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative Research," *The Sage handbook of qualitative research No. 1* (2005): 1–32.

2024. Tahun 2017 dipilih sebagai awal batasan penelitian karena pada tahun tersebut terjadinya awal pemberlakuan kebijakan Tiongkok yaitu *national swords policy*.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah objek yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, serta dianalisis.²⁹ Maka dari itu unit analisis dari penelitian ini adalah Australia, dengan fokus respon Pemerintah Australia. Unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis.³⁰ Untuk unit eksplanasi penelitian ini adalah larangan ekspor limbah kepada Tiongkok. Hal ini membahas bagaimana perubahan kebijakan limbah Tiongkok dapat mempengaruhi Australia. Dengan demikian maka level analisis dari penelitian ini adalah negara, hal tersebut didorong dikarenakan penelitian ini berfokus kepada melihat respon yang diberikan Australia terkait kebijakan larangan ekspor limbah kepada Tiongkok.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis memilih studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi Pustaka adalah metode dimana peneliti akan mencari seluruh data terkait melalui bahan bacaan seperti buku, dokumen, arsip atau literatur berhubungan yang tersedia dalam perpustakaan.³¹ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber utama yang digunakan yaitu dokumen *National Waste Policy Action Plan 2019* dan laporan yang dikeluarkan oleh Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water of Australia dan MRA *Consulting Group*. Selain dari sumber data utama data sekunder lainnya yang digunakan oleh peneliti berupa artikel berita online, artikel jurnal, dan lainnya.³² Contoh studi pustaka yang digunakan yaitu artikel jurnal yang ditulis penulis juga menggunakan beberapa sumber lainnya oleh Wynstoon Joon Yuen Lee dengan judul “The Political Economy of Australia’s Waste

²⁹ Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.*, 1990.

³⁰ Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.*

³¹ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta Galia Indonesia 2003) hal 27

³² Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

Crisis: From Neoliberalism to the Circular Economy Agenda”. Dalam pencarian data melalui *website* peneliti menggunakan kata kunci *Australia’s waste policies, China’s waste policies, Australia’s National Waste Policy Action Plan*, dan ekspor impor limbah Australia. Keseluruhan data yang terkumpul kemudian akan diolah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif, penulis menganalisis unit analisis dan unit eksplanasi guna mencari hubungan pada kumpulan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, lalu hal tersebut menjadi landasan penulis untuk menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tahapan yang akan dilewati dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu Reduksi data, penyajian data, serta Kesimpulan dan Verifikasi.³³

1. Reduksi data

Pada tahap ini penulis akan mengelompokan data yang telah penulis kumpulkan ke dalam beberapa kategori yaitu. Kebijakan larangan impor limbah di Tiongkok serta, ekspor impor limbah Australia dan kebijakan pengelolaan limbah oleh pemerintah Australia. Data yang telah penulis kumpulkan sesuai dengan batasan penelitian yaitu tahun 2018 – 2022. Setelah pengelompokan tersebut dilaksanakan penelitian ini akan membutuhkan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan limbah Australia dalam menjawab kebijakan larangan impor limbah di Tiongkok.

2. Penyajian data

Setelah membaca dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, data – data penting dari dokumen dan bahan tersebut akan diolah dan diambil bagian pentingnya dengan cara memparafrase dengan Bahasa dan gaya penulisan dari penulis sendiri

³³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication. 1994.18.

tanpa mengubah arti dan ide inti dari penulis sebelumnya dan melakukan analisis terhadap data dan bahan bacaan yang telah dikumpulkan oleh penulis. Peneliti menganalisis kebijakan Australia terkait ekspor impor dan pengelolaan limbah di Australia setelah pemberlakuan kebijakan larangan impor limbah di Tiongkok.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Setelah proses penyajian data yang berupa hasil dari analisis penulis dan pengaplikasian konsep yang digunakan dalam penelitian, penulis akan menyimpulkan dan melakukan verifikasi terhadap penelitian ini untuk memastikan bahwa kerangka berfikir yang digunakan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi signifikansi dari penelitian serta menyajikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, penetapan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan kerangka konseptual, metodologi dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Bab 2: Dinamika Hubungan Australia-Tiongkok Terhadap Perdagangan Sampah Kontemporer

Bab ini berisikan tentang dinamika hubungan bilateral antara Australia dan Tiongkok masa ke masa. Bab ini juga menjelaskan dan menguraikan posisi Australia dari masa ke masa dan korelasi antara posisi Australia, hubungan Australia dengan Tiongkok, serta perdagangan sampah antara kedua negara tersebut.

Bab 3: Perkembangan Kebijakan Limbah dan Lingkungan Australia

Bab ini berisikan tentang penjelasan bagaimana selama ini Australia mengolah limbahnya, penyebab pemberlakuan kebijakan-kebijakan terkait limbah Australia.

Bab 4: Analisis Respon Australia terhadap Pelarangan Ekspor Limbah Kepada Tiongkok melalui National Sword Policy 2017

Bab ini berisi deskripsi serta analisis dari proses yang akan diambil oleh Australia dalam merespon kebijakan larangan ekspor limbah ke Tiongkok yang akan dianalisis melalui konsep yang penulis gunakan yaitu *Rational Choice Theory* oleh Charles Kegley dan Shannon Blanton dengan empat indikatornya.

Bab 5: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan serta saran dari penelitian terhadap penelitian selanjutnya.

